

## **BAB III**

### **SEKOLAH KOREA UTARA DI JEPANG**

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai sekolah Korea Utara di Jepang yang diawali dengan penjelasan mengenai etnis Korea dan keberadaan sekolah internasional di Jepang yang dilanjutkan dengan sekolah Korea Utara dimulai dari sejarahnya hingga ke sistem pendidikan yang diterapkan di dalamnya. Sebagai etnis minoritas terbesar di Jepang, tentunya etnis Korea membutuhkan sekolah demi menopang pendidikan yang mengajarkan budaya leluhur mereka. Baik belajar bahasa, seni, sejarah, hingga belajar mengenai sosok pemimpin di negara asal leluhur mereka tersebut. Keberadaan etnis Korea merupakan hasil dari sejarah di masa lalu. Korea Utara dan Jepang memang memiliki hubungan sejarah yang panjang dan sangat dinamis di dalamnya. Hubungan keduanya dimulai sejak Jepang melakukan penjajahan terhadap Korea (pada masa itu Korea belum terpecah menjadi dua) pada tahun 1910. Hingga saat ini, kedua negara belum memiliki hubungan diplomatik dan belum adanya normalisasi hubungan tidak seperti Jepang dengan Korea Selatan.

#### **A. Etnis Korea di Jepang**

Etnis Korea merupakan etnis minoritas terbesar di Jepang dengan persentase yaitu *Japanese* 98.5%, *Koreans* 0.5%, *Chinese* 0.4%, dan lainnya 0.6%.<sup>1</sup> Sebagai etnis minoritas terbesar di Jepang, etnis Korea mendirikan sekolah

---

<sup>1</sup> Central Intelligence Agency, "East and Southeast Asia : Japan", Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html> (diakses pada 5 Oktober 2014).

Korea baik Utara maupun Selatan untuk mengajarkan kepada keturunan mereka mengenai bahasa dan budaya Korea.

Etnis Korea di Jepang biasa disebut dengan *Zainichi Koreans*. Secara ideologis mereka terbagi menjadi dua kelompok etnis dan mendirikan dua asosiasi dengan orientasi politik yang berbeda. Saat ini sekitar 400.000 *Zainichi Koreans* yang secara politik dan ideologi terhubung dengan Korea Selatan, menjadi bagian dari *Mindan*. Sedangkan sekitar 150.000 *Zainichi Koreans* yang secara politik dan ideologi terhubung dengan Korea Utara, maka mereka tergabung dalam *Chongryon*. Pada 10 tahun pertama, anggota *Chongryon* lebih banyak daripada *Mindan*. Setelah Jepang melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan pada tahun 1965, anggota *Mindan* mendapat beberapa keuntungan yaitu diakuinya Kewarganegaraan Korea Selatan misalnya diakuinya paspor Korea Selatan dan terdaftar sebagai permanen residen di Jepang. Anggota *Chongryon* tidak memiliki dokumen yang valid untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak memiliki status sebagai residen di Jepang sampai tahun 1981.<sup>2</sup> Hingga saat ini Jepang dan Korea Utara belum melakukan normalisasi hubungan sehingga *Chongryon* merupakan perwakilan Korea Utara secara tidak resmi di Jepang karena kedua negara belum menjalin hubungan diplomatik.<sup>3</sup>

Selama tahun 1910-an, kolonial Jepang melakukan pengambilan lahan yang dimiliki oleh petani Korea yang menyebabkan terjadinya eksodus (kepergian besar-besaran) ke luar negeri oleh petani Korea untuk mencari pekerjaan.

---

<sup>2</sup> Apichai W. Shipper, "Nationalisms of and Against Zainichi," *Asian Politics & Policy*, Volume 2 Number 1 (2010) : 6.

<sup>3</sup> Zachary Keck, "UN Raps Japan For Not Funding Pro- Pyongyang Schools," *The Diplomat* Web site, <http://thediplomat.com/2013/05/un-raps-japan-for-not-funding-pro-pyongyang-schools/> (diakses pada 21 September 2014).

Meningkatnya jumlah petani yang terlantar karena kehilangan lahan mereka membuat mereka bermigrasi ke Jepang. Pada tahun 1920, hampir sekitar 30.000 warga Korea yang melakukan imigrasi ke Jepang. Setelah terjadi kekacauan stok beras Jepang pada tahun 1918, Jepang melakukan pengaturan ulang terhadap lahan pertanian koloninya untuk menstabilisasi suplai beras. Ini menyebabkan pertambahan migrasi yang tadinya 300.000 menjadi 400.000 petani Korea yang masuk ke Jepang di akhir tahun 1930.<sup>4</sup> Antara tahun 1939 dan 1945, pemerintah Jepang membawa 700.000 – 800.000 penduduk Korea untuk bekerja di Jepang.<sup>5</sup>

Selama masa penjajahan, etnis Korea menjadi penduduk Jepang di mana bahasa dan budaya Korea dilarang dan agama Jepang yaitu Shintoisme dan sistem peribadatan kerajaan menjadi bagian dari subjek kolonisasi. Di tahun 1945, Jepang dikalahkan oleh AS dan sekutunya, dan Korea mendapatkan kebebasan. Setelah kekalahan Jepang, sekitar 2 juta warga Korea mendapat kesempatan untuk memilih kembali ke Korea atau tinggal di Jepang. Kira-kira 650.000 orang memilih untuk tetap tinggal di Jepang. Namun, harapan untuk kembali ke Korea hancur ketika terjadi perang Korea pada tahun 1950-1953 yang menyebabkan pecahnya Korea menjadi utara dan selatan.<sup>6</sup>

Dibawah pendudukan sekutu, terutama AS, status kewarganegaraan etnis Korea menjadi tidak jelas. General Douglas MacArthur menerima beberapa instruksi dari Washington untuk menjadikan etnis Korea sebagai “liberated nation” atau “enemy nation.” Sebagai hasilnya, kewarganegaraan Jepang yang didapat

---

<sup>4</sup> Soo Im Lee, “Diversity of *Zainichi* Koreans and Their Ties to Japan and Korea,” Working Paper Series Studies on Multicultural Societies No.8 (2012) : 2-3.

<sup>5</sup> Spice Stanford, “Korean in Japan,” Spice Stanford Web site, <http://spice.stanford.edu> (diakses pada 18 September 2014).

<sup>6</sup> Im Lee, Diversity of *Zainichi* Koreans and Their Ties to Japan and Korea, Op.Cit., hal. 3.

oleh etnis Korea pada masa kolonialisasi berubah menjadi orang asing dan diharuskan untuk membawa *alien registration documents* yang menyatakan bahwa kewarganegaraan mereka adalah Korea.<sup>7</sup>

Pada tahun 1952, ketika perjanjian San Fransisco diterapkan dan Jepang memperbaiki otonominya, kewarganegaraan Jepang yang dimiliki warga Korea yang tinggal di Jepang dicabut kembali tanpa adanya pemberitahuan.<sup>8</sup> Belakangan, pemerintah Jepang memberikan akses pada warga Korea berupa *public housing*, pinjaman, dan bahkan beberapa posisi di pemerintahan lokal namun mereka harus tetap membawa *alien registration certificate*. Warga asing di Jepang yang telah tinggal selama lima tahun berkesinambungan dapat mengajukan untuk mengganti kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Jepang. Sebagian besar dari warga Korea memilih untuk tidak mengajukannya (salah satu syaratnya adalah memiliki nama Jepang) karena dianggap mengkhianati warisan budaya mereka. Namun tidak sedikit juga etnis Korea di Jepang yang memilih untuk menggunakan nama Jepang dan mengganti kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Jepang demi menghindari tindakan diskriminatif dari masyarakat.<sup>9</sup>

Etnis Korea di Jepang memang tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki masalah internal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh sejarah masa lalu di mana Korea Utara pernah melakukan penculikan terhadap warga Jepang sehingga masyarakat merasa terancam jika hal

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>9</sup> Kenneth Christie dan Denny Roy, *The Politics of Human Rights in East Asia* (London : Pluto Press, 2001), 271-272.

tersebut terjadi kembali. Selain itu, hubungan Jepang dengan Korea Utara belum mengalami normalisasi dikarenakan oleh masalah nuklir Korea Utara yang mengancam keamanan Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di wilayah Asia Timur yang memiliki sejarah panjang terkait dengan masalah HAM. Isu HAM tidak lahir dari dalam negeri Jepang, tetapi muncul karena adanya tekanan dari masyarakat internasional untuk mengadopsi kebijakan HAM yang lebih produktif di mana yang paling berperan adalah Amerika Serikat. Dalam membahas isu tentang HAM, tidak seperti negara sekutu dekatnya yaitu Amerika Serikat yang aktif mempromosikan tentang HAM, Jepang memang cukup berhati-hati mengingat sejarah kelam agresifitas negara ini di masa Perang Dunia II. Negara yang menerapkan sistem monarki konstitusional ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956, namun baru meratifikasi perjanjian mengenai HAM pada akhir tahun 1970-an. Pada tahun 1982, Jepang menjadi bagian dari *United Nations Commission on Human Rights* (UNHCR).

## **B. Sekolah Asing di Jepang**

Sekolah etnis berperan dalam mendidik para warga asing yang berada di Jepang di mana terdapat sejumlah etnis minoritas seperti Korea, Cina dan beberapa etnis lainnya yang melakukan migrasi ke Jepang. Sekolah etnis didirikan atas dasar pemahaman bahwa apa yang ada di sekolah Jepang tidak dapat memenuhi kebutuhan warga asing di Jepang. Sekolah untuk warga asing di Jepang terdiri dari sekolah etnis minoritas yang sudah lama ada (etnis Korea dan Cina), sekolah untuk imigran baru (Brazilian dan etnis Amerika Selatan lainnya),

sekolah internasional Anglophone, sekolah Eropa, dan Sekolah Amerika di Okinawa.<sup>10</sup>

Sekolah asing di Jepang diklasifikasikan sebagai *miscellaneous schools* di bawah *School Education Law*, yang berarti bahwa sekolah tersebut tidak terakreditasi secara domestik. Lulusan dari sekolah asing tidak dapat mengikuti ujian masuk sekolah menengah atas tanpa meraih sertifikat yang setara dari sekolah menengah pertama kemudian mengikuti ujian terpisah. Mereka juga harus lulus ujian *daiken* jika ingin dapat mengikuti ujian masuk universitas.<sup>11</sup> Pada tahun 2003, kementerian pendidikan Jepang membagi sekolah asing menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Sekolah yang telah diakui atau terakreditasi oleh organisasi internasional (*English-speaking international schools*). Sekolah ini juga mendapat status *legal person for the public good* yang membuat sekolah ini dapat menerima donasi tanpa harus dikurangi oleh pajak.
- b. Kategori kedua adalah sekolah yang sistem pembelajarannya dapat diakui secara resmi sebagai koresponden terhadap kurikulum umum dari *native country*. Sekolah tersebut adalah sekolah Korea Selatan, Chinese, dan beberapa sekolah Brazilian.
- c. Kategori ketiga adalah sekolah yang sistem pembelajarannya tidak diakui secara resmi sebagai koresponden terhadap kurikulum umum dari *native*

---

<sup>10</sup> Kaori H. Okano, "Ethnic Schools and Multiculturalisme in Japan", di dalam *Japanese Education in an Era of Globalization*, ed. Gary DeCoker dan Christopher Bjork (USA : Columbia University, 2013), 89.

<sup>11</sup> Kaho Shimizu, "Miscellaneous institutions facing double standard?", *The Japan Times*, <http://www.japantimes.co.jp/news/2001/10/20/national/miscellaneous-institutions-facing-double-standard/#.VQhFtY6UfpA> (diakses pada 5 Maret 2015).

*country*. Sekolah Korea Utara termasuk dalam kategori ini di mana alasan pemerintah memasukan sekolah Korea Utara dalam kategori ini adalah Jepang dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini.<sup>12</sup>

Pada bulan November 2011 terdapat 32 sekolah yang telah terakreditasi sebagai *miscellaneous schools* dan terdapat beberapa sekolah yang telah terakreditasi oleh organisasi akreditasi internasional sebagai *International Baccalaureate*, *WASC (Western Association of Schools and Colleges)*, *ACSI (Association of Christian Schools International)* and the *CIS (Council of International Schools)*. Sedangkan terdapat 26 sekolah yang merupakan anggota dari *JCIS (Japan Council of International Schools)*.<sup>13</sup>

### **C. Sekolah Korea Utara di Jepang**

Sekolah Korea Utara telah berdiri semenjak tahun 1950-an.<sup>14</sup> Sekolah Korea Utara dibangun di berbagai tempat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sekolah ini dibangun oleh warga Korea yang ingin anak mereka untuk belajar bahasa, sejarah, dan budaya Korea sebagai persiapan untuk kembali ke Korea di masa depan.<sup>15</sup> Saat ini terdapat 10 sekolah menengah atas Korea Utara yang berada di Jepang yang tersebar di beberapa wilayah yaitu Tokyo (Tokyo

---

<sup>12</sup> Adam Beije, "The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities," *New Zealand Journal of Asian Studies* 11 (2009) : 123.

<sup>13</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, *Survey Research on Miscellaneous School and Quasi-Incorporated Educational Institution Accreditation of Schools for Foreign Nationals*, Op.Cit.

<sup>14</sup> Keck, *UN Raps Japan For Not Funding Pro- Pyongyang Schools*, Op.Cit.

<sup>15</sup> Yasunori, Fukuoka, "Koreans in Japan: Past and Present," Saitama University Web site, <http://www.han.org/a/fukuoka96a.html> (diakses pada 11 September 2014).

*Joseon High School* di Kita), Osaka, Miyagi, Chiba, Kanagawa (Tokyo Kanagawa *Joseon Middle and High School* di Yokohama), Saitama dan Hiroshima.

### **1. Kronologis Sekolah Korea Utara di Jepang**

Oyamada berpendapat bahwa terdapat tiga periode<sup>16</sup> dalam sejarah sekolah Korea di Jepang yaitu dari berakhirnya perang dunia kedua sampai saat ini.

#### a. Periode Pertama

Periode pertama dimulai diantara tahun 1945, sejak Korea bebas dari Jepang, dan sejak pecahnya perang Korea pada tahun 1950-1953. Sejak periode ini, pendidikan etnis umumnya bertujuan untuk mempersiapkan kembali ke negara asal. Warga Korea sangat berharap untuk dapat kembali ke negaranya, sehingga mereka ingin mengajarkan bahasa Korea kepada anak mereka. Namun, karena perang Korea, mereka kehilangan kesempatan untuk kembali ke negaranya, dan mereka menunda kepulangannya sampai hidup mereka stabil. Sekolah Korea pun muncul sebagai tempat untuk belajar anak-anak Korea.

Pada tahun 1948, kebijakan untuk menutup sekolah Korea muncul. Di dalam kebijakan ini, anak-anak Korea dapat menempuh pendidikan di sekolah Jepang bersama anak-anak Jepang. Kebijakan ini juga menyatakan bahwa sekolah etnis Korea tidak diakui bahkan sebagai jenis sekolah khusus, meskipun mereka diizinkan untuk mendapat kelas etnik sebagai ekstra kulikuler di luar sekolah Jepang. Warga Korea tidak terima dan melakukan negosiasi dengan *Japanese Ministry of Education*. Sebagai hasilnya, kebijakan untuk menutup sekolah Korea menjadi isu pada tahun 1949, ketika warga Korea menjadi bagian dari sekolah

---

<sup>16</sup> Matsumoto, Education Policy for Korean minority in Japan, Op.Cit.

prefektur Jepang. Dengan demikian, mereka setidaknya diizinkan untuk mengajarkan sejarah dan bahasa Korea sebagai ekstrakurikuler, yang secara umum berarti bahwa semua guru adalah orang Jepang dan semua pembelajaran dilakukan dalam bahasa Jepang. Namun kemudian, semenjak terbentuknya *the General Association of Korean Residents* di Jepang pada tahun 1955, sekolah Korea menjadi independen dan setelah beberapa tahun mengampanyekannya, mereka mendapat status sebagai *kakushu gakkō* 各種学校; yaitu *miscellaneous schools*.

b. Periode Kedua

Periode Kedua adalah setelah Perang Korea sampai tahun 1960-an di mana pada periode ini banyak warga Korea Utara yang kembali ke negaranya. Periode ini juga menjadi saat di mana Jepang dan Korea Selatan melakukan normalisasi hubungan. Setelah Korea terbagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, maka menghasilkan dua pandangan ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi ini juga yang akhirnya memecah sekolah Korea yang tadinya hanya ada satu jenis menjadi dua yaitu sekolah pro-Korea Utara dan sekolah pro-Korea Selatan.

c. Periode Ketiga

Periode Ketiga dimulai setelah tahun 1970-an yang menggambarkan bahwa sekolah Korea mulai kehilangan popularitasnya setelah semakin banyak warga Korea mulai mengubah kewarganegaraannya menjadi penduduk tetap Jepang. Pada periode ini, Sekolah Korea Utara mengalami penurunan jumlah

siswa sedangkan sekolah Korea Selatan mengalami peningkatan jumlah siswa yang besar.

## **2. Sistem Pendidikan Sekolah Korea Utara di Jepang**

Sebagai sekolah bagi etnis minoritas terbesar di Jepang, sekolah Korea Utara harus mengalami perjuangan untuk dapat bertahan. Pada tahun 1991, sekolah Korea Utara di Jepang tidak diikutkan dalam pertandingan basket nasional bagi sekolah menengah atas. Kemudian dengan adanya protes dari etnis Korea di Jepang, pada tahun 1994 sekolah Korea Utara dapat ikut bertanding melawan sekolah Jepang. Selain itu, saat ini siswa mendapat diskon pelajar saat menggunakan transportasi umum.<sup>17</sup>

Sekolah Korea Utara saat ini tersebar di Jepang yang terpusat di area metropolitan yang merupakan tujuan dari imigran Korea pada masa kolonial. Pada tahun 2007, terdapat total 69 Sekolah Korea Utara yang terdistribusi dalam 114 departemen dan beberapa *pre-schools* juga satu universitas.<sup>18</sup> Sekolah Korea Utara mendidik sekitar 8.000 etnis Korea mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.<sup>19</sup> Terdapat 12 Sekolah Menengah Atas Korea Utara di Jepang dengan 1.800 siswa meliputi warga Korea Selatan dan Jepang, namun dua sekolah diantaranya telah ditutup.<sup>20</sup> Sistem Pendidikan sekolah Korea Utara yang ada di Jepang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama

---

<sup>17</sup> Okano, *Ethnic Schools and Multiculturalisme in Japan*, Op.Cit., hal. 91.

<sup>18</sup> Beije, *The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities*, Op.Cit., hal.117.

<sup>19</sup> Keck, *UN Raps Japan For Not Funding Pro- Pyongyang Schools*, Op.Cit.

<sup>20</sup> Editorial, "Treat all students equally," *The Japan Times*, <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/03/01/editorials/treat-all-students-equally/#.VMhVDGiUfpD> (diakses pada 25 Desember 2014).

(SMP) 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun sama seperti dengan sekolah Jepang.

Materi yang diajarkan di sekolah Korea Utara tidak banyak berubah sejak tahun 1980-an yang di mana disediakan oleh *Chongryon* dan sebagian disetujui oleh pemerintah Korea Utara. Namun belakangan ini konten yang diajarkan telah berubah dari yang secara ideologi dan dasar sangat menekankan pada keadaan Korea Utara, saat ini lebih berorientasi untuk mempertahankan integritas etnik Korea Utara dalam konteks Jepang.<sup>21</sup>

Jumlah jam belajar Sekolah Menengah Atas Korea Utara adalah 2.850 jam pelajaran yang dibagi menjadi 1.050 jam pada kelas satu dan dua, serta 750 jam pada kelas tiga. Dalam setahun rata rata sekolah dilakukan selama 35 minggu, meliputi ujian, konseling, dan kegiatan lainnya. Mata pelajaran yang dipelajari adalah bahasa Korea, pengetahuan sosial, sejarah Korea, sejarah modern Korea (menggantikan pelajaran mengenai aktifitas revolusioner Kim Il Song and Kim Jong Il), sejarah dunia, geografi dunia, matematika, pengetahuan alam, bahasa Jepang, bahasa Inggris, olahraga, musik (banyak lagu tentang ideologi digantikan dengan lagu tradisional Korea yaitu *folk songs*), IT, dan 11 mata pelajaran pilihan seperti litelatur Korea dan bisnis. Jika kita bandingkan dengan sekolah Jepang, jumlah jam belajar sekolah Menengah Atas Jepang adalah 3.150 jam. Mata pelajaran umum yang diajarkan adalah bahasa Jepang, geografi, sejarah,

---

<sup>21</sup> Beije, *The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities*, Op.Cit., hal. 120.

pengetahuan sosial, matematika, pengetahuan alam, olahraga, kesenian (seperti musik, seni, kerajinan, dan kaligrafi), bahasa asing, *home economics*, dan IT.<sup>22</sup>

Sekolah Korea Utara mengajarkan semua pelajaran dengan bahasa Korea, kecuali dalam pelajaran Bahasa Jepang dan Inggris. Karena mereka tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat, mereka bebas membuat kurikulum termasuk buku pelajaran yang digunakan di sekolah.<sup>23</sup> Buku pelajaran dibuat oleh perusahaan penerbitan yang terhubung dengan *Chongryon* dan tidak jarang juga dikirimkan dari Korea Utara. Hal ini yang membuat sekolah Korea Utara dianggap menyebarkan propaganda anti Jepang di mana mereka mengajarkan sejarah dan politik dari persepektif Korea Utara. Terutama terkait mengenai kekejaman Jepang pada masa penjajahan.

Foto Kim Il Sung sebagai *founding father* Korea Utara dan Kim Jong Il menghiasi setiap sudut di Sekolah Korea, baik di ruangan kelas maupun di asrama. Suasana sekolah sama seperti sekolah yang berada di Korea Utara pada umumnya. Siswa-siswi mengenakan seragam sekolah yang berupa seragam khas sekolah di Korea Utara. Siswi-siswi mengenakan *traditional chima jeogori* yaitu rok panjang dan jaket pendek. Setiap tahun, terdapat program pertukaran yang diadakan pemerintah Korea Utara untuk mengunjungi Pyongyang ketika liburan musim panas.

### **3. Sumber Dana Sekolah Korea Utara di Jepang**

Sekolah Korea Utara di Jepang tentunya membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan segala aktifitas dan kegiatan di sekolah. Sumber dana atau biaya di

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Matsumoto, Education Policy for Korean minority in Japan, Op.Cit.

sekolah Korea Utara sangat mengandalkan dari pembayaran dan khususnya donasi (yang masih harus dikurangi dengan pajak). Sekolah Korea Utara tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat namun hanya mengandalkan sumbangan yang telah dikurangi dengan pajak, pembayaran, dan bantuan regional (dari pemerintah prefektur/lokal. Selain itu pemerintah Korea Utara juga memberikan dana bantuan kepada sekolah Korea Utara. Namun, bantuan yang diperoleh dari pemerintah lokal dan dari pemerintah Korea Utara sangat kecil.<sup>24</sup>

Pemerintah Korea memberikan sekitar 2 juta dolar setiap tahunnya kepada sekolah Korea Utara<sup>25</sup>, namun hal tersebut terus mengalami pengurangan seiring dengan memburuknya keadaan ekonomi di Korea Utara. Sebagai hasilnya, biaya sekolah di sekolah Korea Utara cukup tinggi namun dengan fasilitas yang jauh dibawah jika dibandingkan dengan sekolah Jepang. Para orang tua pun akhirnya memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Jepang karena tidak sanggup membayar biaya sekolah di mana orang tua harus membayar 30.000 yen untuk sekolah menengah atas.

Pemerintah prefektur memberikan bantuan kepada sekolah Korea Utara sejumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Misalnya saja *Kanagawa Joseon Middle and High School* di Yokohama yang memiliki 214 siswa menerima 30 juta yen setiap tahunnya dari prefektur, atau sekitar 150.000 yen per siswa. Namun bantuan tersebut diberhentikan karena adanya uji coba nuklir oleh Korea Utara. Saitama prefektur juga menghentikan bantuan sekitar 9 juta yen bagi sekolah

---

<sup>24</sup> Beije, *The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities*, Op.Cit., hal. 118.

<sup>25</sup> France 24, "Japan's North Korean Schools and University", France 24, <http://www.france24.com/en/20140120-2014-01-20-0644-focus-0/> (diakses pada 3 Februari 2015).

Korea Utara yang berada di prefektur tersebut. Pada tahun 2012, Tokyo, Osaka, Miyagi prefektur, dan Chiba prefektur menghentikan bantuan bagi sekolah Korea Utara. Selanjutnya pada tahun 2013, Kanagawa prefektur, Saitama prefektur, dan Hiroshima prefektur juga melakukan hal yang sama.<sup>26</sup>

Sebagai perbandingan terhadap sekolah Korea Utara, sekolah Korea Selatan tidak mengalami kesulitan finansial karena mendapat bantuan dari pemerintah nasional. Sekolah Korea Selatan termasuk dalam sekolah swasta di Jepang karena mereka mengikuti kurikulum sesuai dengan pemerintah Jepang yang membatasi pelajaran etnis misalnya bahasa Korea dan Sejarah. Mereka juga menggunakan buku pelajaran yang diakui oleh pemerintah Jepang yang secara tidak langsung mengajarkan dari sudut pandang Jepang. Bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa utama sehingga bahasa Korea masuk ke dalam pelajaran bahasa asing.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan etnis Korea dan sekolah Korea merupakan hasil dari sejarah masa lalu yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1910. Sekolah Korea Utara sebagai sekolah etnis bukan merupakan satu-satunya sekolah asing di Jepang namun ada beberapa sekolah lain seperti sekolah Chinese, sekolah Brazilia, dan sekolah Korea Selatan. Hingga saat ini terdapat 10 sekolah menengah atas Korea Utara yang masih beroperasi. Sekolah ini membuat kurikulum dan buku pelajaran mereka sendiri dan mengajarkan semua pelajaran dengan bahasa Korea,

---

<sup>26</sup> Jeong Nam-ku, "Pro-North Korea schools in Japan losing funding due to Pyongyang's latest antics," The Hankyoreh, [http://www.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/574931.html](http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/574931.html) (diakses pada 10 November 2014).

<sup>27</sup> Matsumoto, Education Policy for Korean minority in Japan, Op.Cit.

kecuali dalam pelajaran Bahasa Jepang dan Inggris. Sekolah Korea Utara tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat namun mengandalkan biaya sekolah, donasi, subsidi dari pemerintah lokal dan dari pemerintah Korea Utara. Namun belakangan, beberapa pemerintah lokal memutuskan untuk menghentikan subsidi disaat bantuan dari pemerintah Korea Utara yang semakin kecil. Sehingga sekolah Korea Utara mengalami keterpurukan terutama karena masalah finansial.